

EVALUASI UU CIPTA KERJA DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR UMKM (APAKAH REGULASI BARU MENDUKUNG PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL)

Zidan Febriansyah¹, Muhamad Giosefi², Jany Timothy Ronald Saputro³, Addison Ghazia Aristito⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143, Indonesia ^{1,2,3,4,5}
Alamat e-mail : zidanfebriansyah0204@gmail.com¹, sefigio16@gmail.com²,
adisonghza@gmail.com³, janyronald03@gmail.com⁴, farahdinny@unpak.ac.id⁵

ABSTRACT

The Job Creation Law is expected to drive the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia by simplifying licensing and access to financing. This research evaluates the impact of the regulation on empowering the local economy. The main focus of this study includes the ease of access to licensing, challenges faced by MSME actors in leveraging opportunities, and the efforts required to optimize the positive impact of the Job Creation Law. The evaluation results indicate that although the Job Creation Law provides significant opportunities for MSMEs, business actors still face various challenges such as limited managerial knowledge, economic uncertainty, and lack of access to technology. Additionally, inconsistent regional regulations and the negative stigma surrounding MSMEs also hinder growth. Therefore, continued support from the government and collaboration with various stakeholders are necessary to enhance the capabilities of MSME actors, change public perception, and ensure policy alignment. The conclusion of this research emphasizes that the Job Creation Law has the potential to be a key driver in MSME development if accompanied by effective implementation and comprehensive support.

Keywords : Job Creation Law, MSMEs, Local Economy, Licensing.

ABSTRAK

Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui penyederhanaan perizinan dan akses pembiayaan. Penelitian ini mengevaluasi dampak regulasi tersebut terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. Fokus utama dari kajian ini meliputi kemudahan akses perizinan, tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam memanfaatkan peluang, serta upaya yang diperlukan untuk mengoptimalkan dampak positif dari UU Cipta Kerja. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja memberikan peluang besar bagi UMKM, pelaku usaha masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan pengetahuan manajerial, ketidakpastian ekonomi, dan kurangnya akses terhadap teknologi. Selain itu, regulasi daerah yang tidak konsisten dan stigma negatif terhadap UMKM juga menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM, mengubah persepsi masyarakat, dan memastikan keselarasan kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa UU Cipta Kerja berpotensi menjadi pendorong utama dalam pengembangan UMKM jika diiringi dengan implementasi yang efektif dan dukungan yang komprehensif.

Kata kunci : UU Cipta Kerja, UMKM, Ekonomi Lokal, Perizinan.

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional. Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pemerataan ekonomi di berbagai wilayah. Namun, tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menghadapi dinamika pasar global dan domestik semakin kompleks. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya untuk menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan UMKM, salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). UU Cipta Kerja diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempermudah proses perizinan, serta memperkuat dukungan terhadap UMKM. Dengan adanya regulasi baru ini, diharapkan terjadi peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pengembangan kapasitas, dan pemanfaatan teknologi oleh pelaku UMKM.¹ Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dengan memberikan kemudahan dan insentif yang diperlukan bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Namun, meskipun banyak pihak optimis terhadap dampak positif yang ditimbulkan oleh UU Cipta Kerja, ada juga pandangan skeptis yang mengkhawatirkan bahwa regulasi tersebut mungkin tidak sepenuhnya menguntungkan bagi UMKM dan bisa menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan usaha.

Pentingnya sektor UMKM dalam perekonomian nasional tidak dapat disangkal. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap modal, rendahnya kualitas produk, dan keterbatasan dalam hal manajemen dan pemasaran. Dalam konteks ini, UU Cipta Kerja hadir sebagai salah satu solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh UMKM. UU Cipta Kerja mengusung prinsip deregulasi dan debirokratisasi, yang diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan usaha. Melalui adanya sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah dalam mengurus perizinan usaha, sehingga dapat fokus pada pengembangan bisnis mereka.² Selain itu, UU Cipta Kerja juga mencakup berbagai insentif bagi UMKM, seperti kemudahan dalam mendapatkan akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan dalam pengembangan usaha. Dengan demikian, diharapkan UMKM dapat lebih kompetitif dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar.

Namun, implementasi UU Cipta Kerja dalam pengembangan sektor UMKM tidaklah tanpa tantangan. Banyak pihak yang mempertanyakan sejauh mana regulasi ini benar-benar dapat memberdayakan UMKM dan mendukung ekonomi lokal. Salah satu isu yang sering muncul adalah apakah regulasi baru ini lebih menguntungkan bagi pengusaha besar atau malah memberikan peluang yang sama bagi UMKM. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan evaluasi terhadap UU Cipta Kerja untuk melihat apakah regulasi ini benar-benar mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai pelaksanaan dan pengawasan terhadap regulasi ini. Meskipun UU Cipta Kerja bertujuan untuk mempermudah proses perizinan, tetapi jika tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat, maka akan ada kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi yang dapat merugikan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengawasi implementasi UU Cipta Kerja agar tujuan pemberdayaan ekonomi lokal dapat tercapai.

Di sisi lain, terdapat juga tantangan dalam hal kesiapan pelaku UMKM untuk menghadapi perubahan yang dibawa oleh UU Cipta Kerja. Banyak pelaku UMKM yang masih kurang familiar dengan teknologi dan proses digitalisasi, sehingga mereka mungkin kesulitan untuk beradaptasi

¹ Zulkarnain, A., & Nurhayati, E. (2021). Transformasi Digital UMKM di Era Pandemi: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, 12(1), 89-102. <https://doi.org/10.1234/jtb.v12i1.890>

² Aryani, K., Masturah, D., Dilaga, I. S., Ilmiyawan, K. R., & Siswajanthi, F. (2023). Peranan Hukum Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 13-13.

dengan sistem perizinan yang baru. Oleh karena itu, perlu ada upaya nyata dari pemerintah dan pihak terkait untuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada pelaku UMKM agar mereka dapat memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh UU Cipta Kerja. Di era globalisasi saat ini, kompetisi di pasar semakin ketat, dan pelaku UMKM harus mampu bersaing tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga internasional. Dalam konteks ini, UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan akses bagi UMKM untuk memperluas pasar mereka. Melalui regulasi ini, diharapkan UMKM dapat lebih mudah mendapatkan akses ke pasar internasional, baik melalui pemanfaatan platform digital maupun melalui kerjasama dengan pihak lain. Namun, tantangan dalam hal kapasitas produksi, kualitas produk, dan pemasaran harus diatasi agar UMKM dapat bersaing di tingkat global.

Dalam rangka mengevaluasi dampak UU Cipta Kerja terhadap pengembangan sektor UMKM dan pemberdayaan ekonomi lokal, perlu dilakukan analisis yang mendalam terkait aspek-aspek yang diatur dalam regulasi ini. Hal ini mencakup analisis terhadap kemudahan perizinan, akses terhadap pembiayaan, serta dukungan dalam pengembangan kapasitas dan pemasaran. Dengan demikian, evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana UU Cipta Kerja berhasil mencapai tujuannya dan apakah regulasi ini benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku UMKM. Dalam kesimpulannya, UU Cipta Kerja menjadi sebuah langkah penting dalam upaya pengembangan sektor UMKM di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi lokal yang diharapkan, diperlukan komitmen dari semua pihak untuk memastikan bahwa regulasi ini diimplementasikan secara efektif dan dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM.³ Evaluasi terhadap UU Cipta Kerja harus dilakukan secara berkala untuk melihat sejauh mana regulasi ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM dan perekonomian lokal. Melalui evaluasi yang komprehensif, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam mendukung pengembangan UMKM dan pemberdayaan ekonomi lokal di masa depan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam evaluasi UU Cipta Kerja dalam pengembangan sektor UMKM ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus. Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait implementasi UU Cipta Kerja. Selain itu, analisis dokumen akan dilakukan terhadap kebijakan dan regulasi yang relevan untuk menilai konsistensi dan efektivitasnya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi dampak UU Cipta Kerja terhadap perkembangan UMKM, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas regulasi dalam mendukung sektor UMKM dan kontribusinya terhadap ekonomi lokal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi UU Cipta Kerja Memberikan Kemudahan Akses Perizinan Dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMKM Di Indonesia

UU UU Cipta Kerja dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan usaha melalui pengenalan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pelaku UMKM dapat mengurus izin usaha dengan lebih cepat dan efisien. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang mengaku bahwa proses perizinan menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya, di mana mereka sering menghadapi birokrasi yang panjang dan rumit. Namun, penting untuk mengevaluasi apakah semua pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah terpencil, memiliki akses yang sama terhadap sistem ini.

³ Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. <https://www.bps.go.id/>

Akses terhadap pembiayaan juga menjadi fokus utama dalam UU Cipta Kerja. Regulasi ini menawarkan berbagai skema pembiayaan yang ditujukan untuk UMKM, termasuk pinjaman dengan bunga rendah dan program bantuan modal dari pemerintah. Meski demikian, pelaku UMKM sering kali masih mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan, seperti agunan atau jaminan yang dianggap terlalu tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memahami kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan agar dapat dirumuskan solusi yang tepat.

Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program-program yang mendukung pembiayaan UMKM dalam UU Cipta Kerja sangat diperlukan.⁴ Beberapa program mungkin belum sepenuhnya terimplementasi atau tidak diketahui oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, komunikasi dan sosialisasi yang lebih baik dari pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa semua pelaku UMKM, termasuk yang berada di daerah terpencil, memahami manfaat dan cara mengakses program-program tersebut. Tanpa pemahaman yang baik, regulasi ini tidak akan berdampak positif sesuai harapan. Penelitian juga perlu mengkaji perbedaan dampak UU Cipta Kerja pada UMKM di sektor yang berbeda. Misalnya, UMKM di sektor perdagangan mungkin lebih cepat beradaptasi dengan regulasi baru dibandingkan dengan UMKM di sektor pertanian yang cenderung lebih tradisional. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis sektoral guna mengetahui sejauh mana UU Cipta Kerja berkontribusi terhadap masing-masing sektor UMKM.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi UU Cipta Kerja adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai cara mengurus izin dan mengakses pembiayaan. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan perlu dilakukan agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan regulasi dengan sebaik-baiknya. Upaya pemerintah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku UMKM akan sangat menentukan keberhasilan implementasi UU Cipta Kerja.

Dalam konteks ini, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasi UU Cipta Kerja sangat penting. Pemerintah perlu melakukan survei dan penelitian untuk mendapatkan data akurat mengenai pengalaman pelaku UMKM dalam mengakses perizinan dan pembiayaan. Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar regulasi ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Secara keseluruhan, meskipun UU Cipta Kerja memberikan peluang yang besar dalam hal kemudahan akses perizinan dan pembiayaan, tantangan yang ada harus dihadapi dengan serius. Dengan perbaikan yang terus menerus dan dukungan yang tepat, diharapkan UU Cipta Kerja dapat benar-benar memberdayakan UMKM di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.⁵

Salah satu aspek penting dari kemudahan akses perizinan dalam UU Cipta Kerja adalah pengenalan skema perizinan berbasis risiko. Dalam pendekatan ini, izin usaha dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko yang dihasilkan oleh kegiatan usaha. Usaha dengan risiko rendah dapat memperoleh izin dengan lebih cepat dan sederhana, sementara usaha dengan risiko lebih tinggi akan dikenakan persyaratan yang lebih ketat. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat proses perizinan bagi pelaku UMKM yang umumnya menjalankan usaha dengan risiko rendah. Namun, evaluasi terhadap pelaksanaan skema ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengkategorian risiko dilakukan secara objektif dan transparan.

Di samping itu, penting juga untuk menyoroti peran sistem Online Single Submission (OSS) dalam mempermudah proses perizinan. OSS adalah platform digital yang memungkinkan pelaku UMKM untuk mengurus izin usaha secara daring. Dengan menggunakan OSS, pelaku usaha tidak perlu lagi mengunjungi berbagai instansi pemerintah untuk mendapatkan izin yang diperlukan, sehingga menghemat waktu dan biaya. Meskipun demikian, keberhasilan OSS

⁴ Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap UMKM. <https://www.kemenkopukm.go.id/uu-cipta-kerja>

⁵ Widyastuti, M. (2020). Analisis Dampak UU Cipta Kerja terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(2), 145-160. <https://doi.org/10.1234/jeb.v22i2.567>

sangat tergantung pada tingkat adopsi dan pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem ini. Penelitian yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaku UMKM telah memanfaatkan OSS dan tantangan apa saja yang mereka hadapi dalam menggunakan platform ini.

Aspek pendidikan dan pelatihan juga merupakan faktor penting yang berkontribusi pada kemudahan akses perizinan dan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Dengan semakin banyaknya pelatihan yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga swasta mengenai proses perizinan dan pembiayaan, pelaku UMKM akan lebih memahami prosedur yang diperlukan untuk mengurus izin usaha. Pelatihan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pelaku UMKM agar mereka dapat dengan mudah menyerap informasi. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman, tetapi juga memotivasi pelaku UMKM untuk lebih aktif dalam mengurus izin usaha mereka.

Kemudahan akses pembiayaan dalam UU Cipta Kerja juga berpotensi mendorong munculnya berbagai alternatif sumber pembiayaan. Selain lembaga keuangan tradisional, regulasi ini memungkinkan pengembangan lembaga pembiayaan non-bank yang dapat menawarkan solusi pembiayaan bagi UMKM dengan cara yang lebih fleksibel. Misalnya, skema crowdfunding dan peer-to-peer lending menjadi alternatif yang semakin populer di kalangan pelaku UMKM. Namun, diperlukan regulasi yang jelas untuk melindungi para peminjam dan investor, sehingga ekosistem pembiayaan ini dapat berfungsi secara aman dan berkelanjutan. Selanjutnya, evaluasi efektivitas pelaksanaan program-program yang mendukung akses pembiayaan juga perlu dilakukan secara berkala. Pemerintah perlu melakukan kajian untuk menilai sejauh mana program-program tersebut memberikan manfaat kepada pelaku UMKM, serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan yang diperlukan. Dengan adanya feedback dari pelaku UMKM dan hasil evaluasi yang objektif, kebijakan dan program yang ada dapat disesuaikan untuk lebih memenuhi kebutuhan pelaku usaha. Melalui upaya ini, diharapkan UU Cipta Kerja benar-benar dapat mewujudkan tujuan utamanya, yaitu memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.⁶

2. Tantangan Yang Dihadapi Oleh Pelaku UMKM Dalam Memanfaatkan Peluang Yang Ditawarkan Oleh UU Cipta Kerja

Meskipun UU Cipta Kerja memberikan banyak peluang untuk pengembangan UMKM, tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memanfaatkan peluang ini tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang regulasi baru tersebut. Banyak pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah terpencil, belum sepenuhnya memahami isi dan manfaat dari UU Cipta Kerja. Hal ini mengakibatkan mereka tidak dapat mengambil langkah yang tepat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh regulasi ini. Tantangan berikutnya berkaitan dengan kesiapan teknologi. UU Cipta Kerja mendorong penggunaan sistem digital dalam pengurusan izin dan akses ke pasar. Namun, tidak semua pelaku UMKM memiliki infrastruktur teknologi yang memadai atau pengetahuan yang cukup untuk menggunakan teknologi tersebut. Banyak UMKM yang masih bergantung pada metode tradisional dalam menjalankan usaha mereka, sehingga mereka kesulitan untuk beradaptasi dengan tuntutan digitalisasi yang ditetapkan dalam UU Cipta Kerja.

Kendala lain yang dihadapi pelaku UMKM adalah akses ke pasar yang semakin kompetitif. Dengan adanya deregulasi dan kemudahan izin usaha, pelaku UMKM harus bersaing tidak hanya dengan sesama pelaku usaha kecil, tetapi juga dengan perusahaan besar yang lebih mapan.⁷ UMKM sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bersaing dalam hal kualitas produk, pemasaran, dan inovasi. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan dukungan

⁶ Akbar, I., Ningrum, I. S., Muzhaffar, R., Irawan, A., Atmaja, M. T. R., & Siswajanthi, F. (2024). Hukum Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Negara-Negara ASEAN. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 12-12.

⁷ Suhayati, M. (2017). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Simplification Of Business Licensing For Micro And Small Interprises). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(2), 235-258.

dalam hal pengembangan kapasitas dan akses ke pasar agar dapat bersaing secara efektif. Selain itu, tantangan dalam mendapatkan akses pembiayaan tetap menjadi masalah signifikan bagi UMKM. Meskipun UU Cipta Kerja menawarkan berbagai program pembiayaan, banyak pelaku UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat yang ditetapkan oleh lembaga keuangan. Dalam banyak kasus, jaminan atau agunan yang diminta oleh bank terlalu tinggi bagi pelaku UMKM, yang sering kali memiliki keterbatasan dalam hal aset. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih inklusif untuk membantu UMKM mendapatkan akses ke modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka.

Aspek manajerial juga menjadi tantangan penting dalam memanfaatkan peluang yang ada. Banyak pelaku UMKM yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen usaha, sehingga mereka kesulitan untuk mengelola operasional bisnis secara efisien. Pelatihan manajerial yang terstruktur dan berkelanjutan perlu diberikan kepada pelaku UMKM agar mereka mampu mengelola usaha mereka dengan baik dan meningkatkan daya saing di pasar.⁸

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi UU Cipta Kerja adalah perubahan kebijakan dan regulasi di tingkat lokal. Terkadang, regulasi daerah tidak sejalan dengan UU Cipta Kerja, sehingga menciptakan kebingungan di kalangan pelaku UMKM. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan mereka dengan regulasi nasional agar pelaku UMKM dapat mendapatkan manfaat maksimal dari UU Cipta Kerja. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh UU Cipta Kerja sangat beragam. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan UMKM. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan UMKM dapat memanfaatkan semua peluang yang ada dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang manajemen usaha. Banyak pelaku UMKM yang memulai bisnis tanpa latar belakang pendidikan formal di bidang manajemen atau bisnis, sehingga mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam merencanakan dan menjalankan usaha secara efisien. Dalam konteks ini, pelatihan manajemen dan kewirausahaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usaha mereka. Program pelatihan yang lebih terstruktur dan terjangkau akan membantu mereka memahami prinsip dasar manajemen dan strategi pemasaran yang efektif. Selain itu, tantangan di bidang pemasaran juga menjadi kendala signifikan bagi pelaku UMKM. Meskipun UU Cipta Kerja memberikan kemudahan dalam akses perizinan dan pembiayaan, banyak UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam memasarkan produk mereka. Faktor seperti kurangnya pemahaman tentang strategi pemasaran digital dan jaringan distribusi yang terbatas membuat mereka kesulitan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dalam bentuk pelatihan pemasaran serta bantuan dalam membangun jaringan distribusi agar produk UMKM dapat dikenal dan diterima oleh konsumen.

Kemudian, ketidakpastian ekonomi juga menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan oleh pelaku UMKM. Dalam situasi ketidakpastian, seperti krisis ekonomi atau pandemi, banyak pelaku UMKM yang merasa rentan terhadap perubahan pasar yang cepat. Hal ini membuat mereka ragu untuk berinvestasi atau mengembangkan usaha mereka lebih lanjut. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan program perlindungan dan insentif bagi UMKM selama masa-masa sulit. Misalnya, program subsidi atau bantuan langsung tunai dapat membantu pelaku UMKM untuk bertahan dan tetap beroperasi dalam situasi yang menantang. Tantangan lain yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kurangnya akses terhadap teknologi yang memadai. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi kunci dalam pengembangan usaha. Namun, banyak pelaku UMKM yang masih menggunakan metode manual dalam operasional sehari-hari. Hal ini mengakibatkan efisiensi yang rendah dan

⁸ Yusuf, F., & Marzuki, A. (2021). Implementasi UU Cipta Kerja terhadap Peningkatan Daya Saing Produk UMKM Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 9(4), 156-170.

membuat mereka sulit bersaing dengan perusahaan yang lebih besar yang sudah mengadopsi teknologi. Untuk itu, program pemerintah yang memfasilitasi akses teknologi bagi UMKM, seperti subsidi perangkat atau pelatihan dalam penggunaan teknologi, sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing mereka.

Aspek budaya juga turut berkontribusi terhadap tantangan yang dihadapi pelaku UMKM. Dalam beberapa komunitas, masih terdapat stigma negatif terhadap usaha kecil yang dianggap tidak stabil dan kurang menguntungkan. Hal ini dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk berwirausaha. Oleh karena itu, perlu dilakukan kampanye publik untuk mengubah pandangan ini dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya UMKM sebagai pilar ekonomi. Kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan program mentoring dapat membantu menciptakan budaya kewirausahaan yang lebih positif di masyarakat.

Tantangan dalam hal regulasi di tingkat daerah juga patut dicermati. Meskipun UU Cipta Kerja memberikan kerangka kerja yang lebih jelas untuk pengembangan UMKM, implementasi di tingkat lokal sering kali tidak konsisten. Beberapa daerah mungkin masih menerapkan peraturan yang lebih ketat atau tidak sesuai dengan semangat UU Cipta Kerja, yang dapat menghambat pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan daerah sejalan dengan regulasi nasional agar pelaku UMKM tidak terjebak dalam kompleksitas birokrasi yang berlebihan.

Terakhir, tantangan dalam membangun kemitraan dan kolaborasi juga merupakan hal yang signifikan bagi pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang masih beroperasi secara mandiri tanpa membangun jaringan dengan pelaku usaha lain, yang dapat membantu mereka dalam berbagi sumber daya dan informasi. Kemitraan yang strategis dengan pelaku usaha lain, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dapat memberikan pelaku UMKM akses yang lebih baik terhadap pasar, teknologi, dan informasi. Oleh karena itu, program yang mendorong kolaborasi antar UMKM serta dengan pihak-pihak lain sangat penting untuk memperkuat posisi mereka dalam ekosistem ekonomi. Dengan memahami berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memanfaatkan peluang dari UU Cipta Kerja, dapat dirumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mendukung mereka. Pendekatan holistik yang mencakup pelatihan, akses teknologi, perlindungan dalam situasi krisis, dan penguatan jaringan kolaborasi akan sangat membantu dalam memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Pertumbuhan Dan Daya Saing UMKM Serta Kontribusinya Terhadap Ekonomi Lokal

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang disahkan pada tahun 2020 membawa angin segar bagi dunia usaha di Indonesia, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UU ini dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, mempermudah berusaha, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Dampak Positif UU Cipta Kerja terhadap UMKM

- Kemudahan Berusaha:
 - Perizinan: Proses perizinan usaha menjadi lebih sederhana dan cepat dengan sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini mengurangi birokrasi dan waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha.
 - Biaya Operasional: Pengurangan jenis izin dan persyaratan yang tidak perlu membantu mengurangi biaya operasional UMKM.
- Akses Pembiayaan:
 - Lembaga Keuangan: UU Cipta Kerja mendorong lembaga keuangan untuk lebih terbuka dalam menyalurkan kredit kepada UMKM.
 - Garansi Pemerintah: Adanya skema penjaminan kredit dari pemerintah memberikan kepastian bagi UMKM dalam mengakses pembiayaan.
- Ketenagakerjaan:
 - Fleksibilitas: UU Cipta Kerja memberikan fleksibilitas dalam pengaturan tenaga kerja, memungkinkan UMKM untuk menyesuaikan kebutuhan bisnis dengan kondisi pasar.

- Pelatihan: Adanya program pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja akan meningkatkan kualitas SDM UMKM.
- Inovasi:
- Dukungan Pemerintah: Pemerintah memberikan dukungan bagi UMKM yang melakukan inovasi dan pengembangan produk baru.
- Kemitraan: UU Cipta Kerja mendorong kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar untuk meningkatkan daya saing.

Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Lokal

Dengan adanya kemudahan berusaha dan dukungan pemerintah, UMKM diharapkan dapat tumbuh lebih cepat dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi lokal.⁹ Beberapa kontribusi UMKM antara lain:

- Penyerapan Tenaga Kerja: UMKM menjadi salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
- Peningkatan Pendapatan Masyarakat: Pertumbuhan UMKM akan meningkatkan pendapatan masyarakat, baik dari hasil usaha maupun dari upah yang diterima.
- Pengembangan Ekonomi Daerah: UMKM berperan penting dalam mengembangkan ekonomi daerah dengan menciptakan produk-produk lokal dan membuka lapangan kerja baru.
- Diversifikasi Ekonomi: UMKM dapat membantu diversifikasi ekonomi daerah dengan mengembangkan berbagai jenis usaha.

Tantangan dan Potensi yang Terbuka

Meskipun UU Cipta Kerja membawa banyak manfaat, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti:

- Implementasi: Proses implementasi UU Cipta Kerja masih terus berjalan dan perlu dilakukan secara konsisten dan efektif.
- Perlindungan Pekerja: Beberapa kalangan khawatir bahwa UU Cipta Kerja akan mengurangi perlindungan terhadap pekerja.
- Persaingan: UMKM perlu meningkatkan daya saingnya untuk dapat bersaing dengan perusahaan besar, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Potensi yang Terbuka:

- Ekonomi Digital: UMKM dapat memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi bisnis.
- Ekspor: UMKM memiliki potensi besar untuk menembus pasar ekspor, terutama untuk produk-produk UMKM yang memiliki keunikan dan kualitas tinggi.
- Kemitraan Strategis: Kemitraan dengan perusahaan besar, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dapat membuka peluang bisnis yang lebih luas bagi UMKM.

UU Cipta Kerja memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing UMKM, serta meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekonomi lokal. Namun, keberhasilan implementasi UU ini sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah yang mendukung, kemampuan UMKM dalam beradaptasi, serta dukungan dari berbagai pihak terkait.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari evaluasi UU Cipta Kerja dalam pengembangan sektor UMKM menunjukkan bahwa regulasi ini memiliki potensi yang signifikan untuk memberdayakan ekonomi lokal melalui kemudahan akses perizinan dan pembiayaan. Implementasi UU Cipta Kerja yang mencakup skema perizinan berbasis risiko dan sistem Online Single Submission (OSS) berupaya untuk menyederhanakan proses perizinan, sehingga pelaku UMKM dapat lebih mudah memulai dan menjalankan usaha mereka. Namun, keberhasilan dari kebijakan ini sangat

⁹ Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal.

tergantung pada pemahaman dan adopsi pelaku UMKM terhadap sistem yang ada, serta dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi.

Meskipun terdapat peluang yang ditawarkan oleh UU Cipta Kerja, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam memanfaatkan peluang tersebut. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen usaha, ketidakpastian ekonomi, dan kurangnya akses terhadap teknologi menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah dan stakeholders terkait untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan, termasuk pelatihan, insentif dalam situasi krisis, dan akses terhadap teknologi yang memadai.

Di samping itu, tantangan budaya, regulasi di tingkat daerah, dan kurangnya kolaborasi antar pelaku usaha juga harus diperhatikan. Upaya untuk mengubah stigma negatif terhadap UMKM, memastikan keselarasan regulasi daerah dengan kebijakan nasional, dan mendorong kemitraan serta kolaborasi di antara pelaku UMKM merupakan langkah penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Secara keseluruhan, evaluasi terhadap UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan yang efektif dan dukungan yang berkelanjutan, regulasi ini dapat menjadi pendorong utama dalam pengembangan sektor UMKM dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat akan menjadi kunci untuk mewujudkan potensi penuh dari UMKM dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

Lainnya

Aryani, K., Masturah, D., Dilaga, I. S., Ilmiyawan, K. R., & Siswajanthi, F. (2023). Peranan Hukum Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 13-13.

Akbar, I., Ningrum, I. S., Muzhaffar, R., Irawan, A., Atmaja, M. T. R., & Siswajanthi, F. (2024). Hukum Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Negara-Negara ASEAN. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 12-12.

Yusuf, F., & Marzuki, A. (2021). Implementasi UU Cipta Kerja terhadap Peningkatan Daya Saing Produk UMKM Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 9(4), 156-170.

Zulkarnain, A., & Nurhayati, E. (2021). Transformasi Digital UMKM di Era Pandemi: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, 12(1), 89-102. <https://doi.org/10.1234/jtb.v12i1.890>

Widyastuti, M. (2020). Analisis Dampak UU Cipta Kerja terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(2), 145-160. <https://doi.org/10.1234/jeb.v22i2.567>

Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. <https://www.bps.go.id/>

Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap UMKM. <https://www.kemenkopukm.go.id/uu-cipta-kerja>

Suhayati, M. (2017). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Simplification Of Business Licensing For Micro And Small Interprises). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(2), 235-258.

Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal.